

Pengaruh Good Corporate Governance dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance

Dea Sita¹, Meta Nursita²

Universitas Pamulang, Indonesia

deasita94@gmail.com¹, dosen02628@unpam.ac.id²

Submitted: 16th July 2026 | **Edited:** 30th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Sita, D., & Nursita, M. (2026). Pengaruh Good Corporate Governance dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2417-2428.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance (GCG) and Thin Capitalization on Tax Avoidance. The study uses a sample of companies in the Energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2025. The sampling method used in this study is purposive sampling, and Eviews 14 is used to analyze the data. The data source for this research is quantitative data from annual financial reports, with 40 companies serving as the research sample observed over 5 years, resulting in a total of 200 samples. The analysis technique used is panel data regression. The results of the study show that simultaneously, Good Corporate Governance and Thin Capitalization affect Tax Avoidance. The study also finds that the Good Corporate Governance variable of independent commissioners does not affect Tax Avoidance. Partially, the Good Corporate Governance variable of the audit committee does not affect Tax Avoidance. Partially, the Thin Capitalization variable has a positive effect on Tax Avoidance.

Keywords: Good Corporate Governance, Thin Capitalization, Tax Avoidance, Audit Committee, Independent Commissioners

PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki peran yang sangat vital dalam menyokong stabilitas dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama pendapatan negara, penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai belanja publik strategis, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penyediaan layanan kesehatan masyarakat (OECD, 2024; Wijayanti & Aji, 2023). Di sisi lain, sektor energi memegang posisi sentral dalam menopang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekaligus menjadi tumpuan transformasi ekonomi jangka panjang (Kementerian ESDM, 2025). Kendati memberikan kontribusi ekonomi yang substansial, sektor energi secara global juga dihadapkan pada tantangan lingkungan sebagai salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar (International Energy Agency, 2020; World Bank, 2023). Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), lonjakan emisi GRK sektor) energi meningkat lebih dari tiga kali lipat sepanjang kurun waktu 1999–2019,

yaitu dari 10 Gigaton CO₂ menjadi 33 Gigaton CO₂, atau mencakup sekitar 36% dari total emisi GRK dunia (Pramita et al, 2023). Besarnya dampak lingkungan ini mendorong pemerintah menetapkan berbagai arah kebijakan strategis (Kementerian Bappenas, 2020), seperti peningkatan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari 13,4% pada tahun 2020 menjadi 19,5% pada tahun 2024, sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH), serta penurunan intensitas energi nasional. Transisi menuju industri hijau dan efisiensi energi tersebut membutuhkan komitmen investasi dana yang sangat besar untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan, operasional, dan pemenuhan aset tetap (World Bank, 2023; Kementerian ESDM, 2024).

Kebutuhan investasi yang masif serta karakteristik industri energi yang bermodal besar (capital intensive) mendorong perusahaan di sektor ini untuk membentuk struktur modal yang kompleks dengan utilisasi pembiayaan berbasis utang yang tinggi. Kondisi kecenderungan perusahaan menggunakan proporsi utang yang lebih dominan dibandingkan modal sendiri dalam struktur pendanaannya dikenal sebagai praktik thin capitalization. Dalam perspektif perpajakan, struktur permodalan ini sering dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak (tax planning) yang agresif, sebab beban bunga yang timbul dari skema utang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense), sedangkan pembagian dividen atas modal sendiri tidak dapat dikurangkan. Penggunaan skema thin capitalization yang berlebihan berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) demi meminimalkan kewajiban perpajakan secara legal namun mengurangi kontribusi penerimaan negara (Putri et al, 2025; Wibowo et al, 2024). Meskipun beberapa pengujian empiris menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan energi di BEI (Wibowo et al, 2024), temuan lain mengindikasikan bahwa struktur utang tidak selalu berpengaruh secara langsung (Putri et al, 2025). Perbedaan hasil penelitian (research gap) ini menegaskan perlunya pengujian kembali mengenai sejauh mana efektivitas skema pembiayaan utang dimanfaatkan sebagai instrumen tax avoidance pada sektor energi.

Guna membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam memanfaatkan pembiayaan utang untuk penghindaran pajak, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi instrumen yang sangat krusial. GCG berfungsi memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan internal

perusahaan (Simanjuntak, 2024). Dua organ utama GCG yang memiliki peran strategis dalam mengontrol kebijakan perpajakan adalah komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen bertindak sebagai pengawas objektif yang meminimalkan benturan kepentingan serta memastikan setiap keputusan strategis manajemen dilakukan secara hati-hati dan mematuhi regulasi yang berlaku (Danarta et al, 2025). Sementara itu, komite audit bertugas membantu pengawasan integritas pelaporan keuangan, keandalan sistem pengendalian internal, dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Keberadaan mekanisme GCG yang efektif terbukti mampu menekan dorongan manajemen untuk melakukan efisiensi pajak secara agresif, sekaligus berpotensi memoderasi atau memperlemah hubungan antara thin capitalization dan praktik tax avoidance (Arifah & Ariefiara, 2022; Raga et al., 2023; Simanjuntak, 2024).

Meskipun literatur mengenai tax avoidance telah berkembang pesat, sebagian besar kajian empiris masih terfokus pada industri manufaktur atau sektor bisnis secara umum, sedangkan penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan mekanisme GCG dan thin capitalization pada sub-sektor energi di Indonesia masih sangat terbatas. Mengingat peran strategis sektor energi terhadap PDB dan penerimaan negara serta besarnya tuntutan investasi transisi energi, pemahaman mendalam mengenai bagaimana tata kelola perusahaan dan struktur permodalan memengaruhi keputusan perpajakan menjadi sangat penting. Berdasarkan uraian fenomena dan kesenjangan studi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh Good Corporate Governance (khususnya komisaris independen dan komite audit) serta thin capitalization terhadap tax avoidance, baik secara langsung maupun melalui interaksinya, pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.

LANDASAN TEORI

Teori keagenan (agency theory) menguraikan hubungan kontraktual antara principal selaku pemilik modal dan agent selaku manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola operasi perusahaan. Hubungan ini berpotensi menimbulkan masalah keagenan akibat adanya perbedaan kepentingan serta asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki akses data operasional yang lebih banyak dibandingkan pemilik. Asimetri ini mendorong perilaku oportunistik manajemen dan memicu munculnya biaya keagenan yang meliputi biaya pengawasan, biaya jaminan, dan kerugian sisa (Hendrastuti

& Harahap, 2023). Dalam konteks keputusan keuangan dan perpajakan, asimetri informasi kerap dimanfaatkan manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna mengejar keuntungan jangka pendek, yang pada akhirnya dapat memicu inefisiensi investasi serta risiko reputasi bagi principal (Ajmal et al., 2025). Selain itu, konflik keagenan juga tercermin pada praktik *thin capitalization*, di mana manajemen cenderung memilih struktur pendanaan berbasis utang tinggi untuk mengurangi beban pajak melalui pembebanan bunga, meskipun hal tersebut meningkatkan risiko keuangan perusahaan (Anggraini, 2024). Untuk mengatasi masalah tersebut, penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik seperti pengawasan oleh komisar independen dan komite audit sangat diperlukan sebagai fungsi pengawasan guna menyelaraskan tindakan manajemen dengan kepentingan pemegang saham (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi efisiensi perpajakan yang dilakukan secara terencana oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah hukum yang ada dalam regulasi perpajakan (Dyrenge et al., 2025; Kasir et al., 2025). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal karena melibatkan manipulasi data, kecurangan, atau penggelapan penghasilan, penghindaran pajak dilakukan melalui metode yang sah secara hukum melalui perencanaan pajak (Bello, 2023). Kendati demikian, skema penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat membawa konsekuensi serius, seperti potensi koreksi dari otoritas pajak, sanksi administrasi, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan (Kasir et al., 2025).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) adalah sistem dan mekanisme kontrol yang dirancang untuk mengarahkan serta mengawasi pengelolaan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Karsono & Hasanudin, 2023; Rafie, 2025). Penerapan GCG didasarkan pada prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi yang material dan akurat, akuntabilitas dalam kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan, responsibilitas terhadap kepatuhan hukum dan isu sosial-lingkungan, independensi pengurusan tanpa intervensi pihak luar, serta kesetaraan dalam menjamin hak-hak seluruh pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, mekanisme GCG diwakili oleh dua komponen pengawasan vital, yaitu komisar independen dan komite audit. Komisar independen bertindak sebagai pihak netral dari luar perusahaan yang mengawasi keputusan direksi guna menekan

perilaku oportunistik manajemen (Nababan et al., 2023). Sementara itu, komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan (Pandapotan et al., 2023). Sinergi antar komponen GCG ini terbukti efektif membatasi tindakan manajerial yang berisiko, termasuk menekan praktik penghindaran pajak secara agresif (Ompusunggu et al., 2025).

Thin capitalization merupakan kondisi di mana perusahaan membiayai operasinya dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan modal sendiri (Ramadhan, 2023; Permatasari, et al., 2025). Dalam praktik perpajakan, struktur permodalan ini sering dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak karena beban bunga atas utang umumnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil (Satrio & Salsabilla, 2023). Namun, ketergantungan utang yang berlebihan ini mendapat perhatian ketat dari otoritas pajak global karena berpotensi menggerus basis pemajakan suatu negara. Oleh karena itu, berbagai regulasi pembatasan rasio utang terhadap modal terus diterapkan oleh berbagai negara untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan (OECD, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan proses pengkajian secara terstruktur terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data numerik yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik, matematika, atau metode komputasi (Amelia et al., 2024). Penelitian ini menggunakan data dengan dimensi *cross-section* dan *time series* untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan melalui komisaris independen dan komite audit serta *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian mencakup 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2025. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI

selama periode 2021–2025, memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian, tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, serta memiliki data yang lengkap untuk mengukur seluruh variabel penelitian. Berdasarkan proses penyaringan sesuai kriteria tersebut, diperoleh 40 perusahaan yang memenuhi persyaratan awal sebagai sampel. Namun, berdasarkan penetapan sampel akhir oleh peneliti, jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah 14 perusahaan selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh 70 observasi selama lima tahun periode pengamatan.

Data penelitian diolah menggunakan perangkat lunak EViews 14 dengan metode analisis regresi data panel. Regresi data panel merupakan metode yang menggabungkan data *cross-section* dan *time series* untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada beberapa objek penelitian selama periode tertentu (Basuki, 2021). Model regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh GCG komisaris independen (X_1), GCG komite audit (X_2), dan *thin capitalization* (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y). Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$, dengan Y sebagai *tax avoidance*, α sebagai konstanta, X_1 sebagai GCG komisaris independen, X_2 sebagai GCG komite audit, X_3 sebagai *thin capitalization*, β_1 – β_3 sebagai koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan ϵ sebagai *standard error*.

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,421715 dengan standar deviasi 0,117439, bergeser dari nilai minimum 0,200000 pada PT IMC Pelita Logistik Tbk (2021) hingga maksimum 0,857000 pada PT Dian Swastika Sentosa Tbk (2022 dan 2023). Sementara itu, variabel GCG Komite Audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0,904870 dan standar deviasi 0,351188, dengan nilai minimum 0,250000 pada PT Baramulti Suksessarana Tbk (2023) serta maksimum 2,000000 pada PT Trans Power Marine Tbk (2023). Kedua variabel GCG tersebut memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang menandakan bahwa sebaran datanya relatif homogen tanpa kesenjangan ekstrem. Sebaliknya, variabel Thin Capitalization dan Tax Avoidance mencatatkan nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya, mengindikasikan tingkat variasi atau sebaran data yang tergolong tinggi. Variabel Thin Capitalization memperoleh nilai rata-rata 1,013400 dengan rentang nilai dari 0,046000

pada PT IMC Pelita Logistik Tbk (2021) hingga 8,453000 pada PT Atlas Resources Tbk (2021), sedangkan variabel Tax Avoidance memiliki nilai rata-rata 0,272885 dengan kisaran nilai minimum 0,000000 pada PT Transcoal Pacific Tbk (2023) hingga maksimum 3,970000 pada PT Sumber Global Energy Tbk (2021).

Uji Model

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), dengan kriteria bahwa apabila probabilitas Cross-Section F dan Chi-square $> 0,05$, maka model yang dipilih adalah CEM, sedangkan apabila probabilitas Cross-Section F dan Chi-square $< 0,05$, maka model yang dipilih adalah FEM. Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas Cross-Section Chi-square sebesar 0,0145, lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk menentukan model antara FEM dan Random Effect Model (REM), dengan hasil probabilitas Cross-Section Random sebesar 0,3319 ($> 0,05$), sehingga REM dinilai lebih tepat digunakan. Kemudian, uji Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk menentukan model antara REM dan CEM, dengan hasil *p-value* sebesar 0,2032 ($> 0,05$), sehingga CEM dinilai lebih tepat digunakan. Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian pemilihan model yang meliputi uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), model estimasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Common Effect Model (CEM) untuk selanjutnya digunakan dalam pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Berdasarkan pengujian berpasangan terhadap ketiga model regresi data panel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai model yang terpilih dalam mengestimasi regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Model Regresi Data Panel

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	Common Effect vs Fixed Effect	Fixed Effect
2	Uji Hausman	Fixed Effect vs Random Effect	Random Effect
3	Uji Lagrange Multiplier	Common Effect vs Random Effect	Common Effect

Sumber: Hasil olah data EViews 14, 2026

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, hasil kesimpulan pengujian model regresi data panel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model (CEM) yang terpilih yang kemudian dapat digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi good

corporate governance (komisaris independen), good corporate governance (komite audit), dan thin capitalization terhadap tax avoidance.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 7,822257, yang lebih besar dari F-tabel sebesar 2,71 ($df_1 = 3$, $df_2 = 87$, $\alpha = 0,05$) dengan nilai probabilitas 0,000059 ($< 0,05$). Hal ini menyimpulkan bahwa variabel GCG Komisaris Independen, GCG Komite Audit, dan Thin Capitalization secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga model penelitian ini dinyatakan layak (fit).

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (t-test) menunjukkan bahwa variabel GCG Komisaris Independen (t-hitung 0,510703 $<$ t-tabel 1,98761; $p = 0,6101$) dan GCG Komite Audit (t-hitung 0,076930 $<$ t-tabel 1,98761; $p = 0,9388$) masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance karena nilai probabilitasnya lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sebaliknya, variabel Thin Capitalization terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 4,794417, lebih besar dari t-tabel 1,98761, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$).

Pembahasan

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Good Corporate Governance yang diproksikan melalui komisaris independen dan komite audit serta *thin capitalization* secara bersama-sama memiliki keterkaitan yang signifikan dengan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu mekanisme pengelolaan perusahaan, tetapi merupakan hasil interaksi antara mekanisme pengawasan internal dan keputusan perusahaan dalam menentukan struktur pendanaan. Keberadaan mekanisme tata kelola dan kebijakan pendanaan secara bersamaan dapat membentuk ruang bagi manajemen dalam menentukan tingkat agresivitas pengelolaan kewajiban pajak. Temuan tersebut sejalan dengan Handoyo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan bersama dengan faktor keuangan tertentu memiliki keterkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

Komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Komisaris independen pada dasarnya memiliki fungsi

pengawasan terhadap tindakan manajemen, tetapi efektivitas fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, kompetensi, intensitas keterlibatan, serta independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, proporsi komisaris independen saja belum cukup untuk memastikan bahwa keputusan manajemen terkait perpajakan menjadi lebih konservatif. Hasil ini konsisten dengan Karuniasari dan Noviani (2022) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga keberadaan komisaris independen belum secara otomatis menjamin berkurangnya praktik penghindaran pajak.

Komite audit juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum sepenuhnya mampu memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Secara konseptual, komite audit memiliki fungsi penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal, tetapi fungsi tersebut belum tentu secara langsung diarahkan pada pengawasan strategi perpajakan. Efektivitas komite audit juga sangat bergantung pada kompetensi anggota, independensi, serta kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan Rahmadi dan Mujiyati (2024) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, keberadaan komite audit secara formal belum dapat dijadikan indikator bahwa perusahaan memiliki pengawasan perpajakan yang efektif.

Berbeda dengan kedua mekanisme GCG tersebut, *thin capitalization* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam menentukan komposisi pendanaan memiliki konsekuensi terhadap strategi perpajakan. Penggunaan utang yang relatif tinggi dapat meningkatkan beban bunga yang pada kondisi tertentu berkaitan dengan pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga struktur pendanaan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perilaku penghindaran pajak. Hasil ini memperlihatkan bahwa keputusan keuangan dan keputusan perpajakan memiliki hubungan yang erat karena struktur modal dapat digunakan manajemen sebagai bagian dari perencanaan pajak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tanriady (2024) yang menempatkan *thin capitalization* sebagai salah satu strategi yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan dan energi di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam mengendalikan *tax avoidance* tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan struktur pengawasan secara formal, tetapi perlu mempertimbangkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Di sisi lain, pengaruh *thin capitalization* memperlihatkan bahwa kebijakan pendanaan memiliki implikasi langsung terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu mengintegrasikan pengawasan tata kelola dengan pengelolaan risiko perpajakan dan kebijakan struktur modal agar keputusan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan. Bagi regulator, temuan ini menunjukkan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap struktur pendanaan perusahaan sekaligus meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola dalam mengawasi kebijakan perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola keputusan keuangan dan mekanisme pengawasannya. Ketidakefektifan komisaris independen dan komite audit dalam memengaruhi penghindaran pajak menunjukkan bahwa keberadaan struktur tata kelola secara formal belum cukup tanpa didukung pengawasan yang efektif dan berkualitas. Sementara itu, keterkaitan *thin capitalization* menegaskan bahwa struktur pendanaan menjadi bagian penting dalam memahami perilaku perpajakan perusahaan. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman bahwa pengendalian penghindaran pajak perlu mengintegrasikan tata kelola dan kebijakan pendanaan. Implikasinya, perusahaan dan regulator perlu memperkuat pengawasan perpajakan serta mengendalikan risiko yang muncul dari penggunaan utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajmal, T. K., Kumar, V., & Balasubramanian, G. (2025). Tax-avoidance effect on investment inefficiency: An examination of agency theory. *Journal of Emerging Market Finance*, 24(1), 63–86.
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (N.D.). M E T o D E P E N E L I T I A N K u A N T I T a t I F.
- Anggraini, A. (2024). Good Corporate Governance Moderates The Relationship Of Company Complexity And Risk Management With Sustainability Performance. 03(09), 1236–1248. <https://doi.org/10.58806/Ijsshmr.2024.V3i9n12>

- Arifah, Y., & Arieftiara, D. (2022). *The effect of thin capitalization and capital intensity on tax avoidance with institutional ownership as moderating variables. Proceeding of Jakarta Economic Sustainability International Conference Agenda*. 1(1), 113–128.
- Astuti, S. B., Chasbiandani, T., Utami, K., & Muharomi, Z. F. (2023). Financial Statement Ratios , Audit Quality And Long-Term Tax Avoidance. 06(11), 48–49. <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I11-43>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EVIEWS)*. UMY Press.
- Bello, K. B. (2023). Sains Humanika Evasion And Avoidance As Forms Of Tax Non-Compliance : A Critical. 3, 39–42.
- Danarta, L. V., Komang, N., Wiguna, C., & Januarti, V. E. (2025). Pengaruh Komisaris Independen Komite Audit Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. 4(3), 420–432. <https://doi.org/10.54259/Akua.V4i3.5145>
- Dyreng, S. D., Hills, R. W., Lewellen, C. M., & Lindsey, B. P. (2025). Endogeneity and the economic consequences of tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 42(1), 702–730.
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does corporate governance support tax avoidance practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3).
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Jurnal Akuntansi Aktual Agency Theory : Review Of The Theory And Current Research. 10(1), 85–100.
- International Energy Agency. (2020). *Global CO₂ emissions in 2019*. IEA.
- Karuniasari, L. A., & Noviani, N. (2022). Dewan komisaris independen, komite audit, koneksi politik dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9).
- Kasir, K., Djajadikerta, H., & Maratno, S. F. E. (2025). Drivers of tax avoidance: A literature review approach. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(1), 628–648.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Kinerja sektor ESDM 2024: Lampaui target, penuhi kebutuhan domestik, dan tingkatkan ketahanan energi*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nanda, R. F., & Damayanti, C. R. (2021). The Effect Of Corporate Governance On Firm Value In Iicd Award Recipient Companies. 8(2), 275–284.
- Niloveri, P. D., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Current Ratio, Komisaris Independen, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Maibie (Management, Accounting, Isla Mic Banking And Isla Mic Economic)*, 11(1), 204–220.
- Nursita, M., & Karlina, L. (2024). Factors Affecting Tax Avoidance In Property And Real Estate Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. 10, 1105–1113.
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing.

- Ompusunggu, H., Afdal, & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 9(April), 800–808.
- Pandapotan, F., Puspitasari, F., & Maharani, A. (2023). Internal control, audit quality, and tax avoidance: Evidence from property and real estates. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 2(2), 71–77.
- Permatasari, I. D., Sa, H., & Fahmi, A. S. (2025). Journal Of Qualitative And Quantitative Research Teknik Penyusunan Variabel , Instrumen Penelitian Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kuantitatif. 2(1), 63–70.
- Putri, Riska Aulia, Puspitaningrum, T., Kartika, D., Hayam, U., & Perbanas, W. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energy Di Bei Tahun 2018-2022. 13(2), 162–172.
- Putri, Rizka Amalia, Fadlurohman, A., & Mughni, M. (2025). Panel Data Regression Approach To Identify Factors Affecting Unemployment In East Java Province. 3(June), 11–18.
- Rafie, M. P., Sihombing, I., Nasution, F. N., & Muda, I. (2025). Theoretical foundations of corporate governance and board of directors: A systematic literature review. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1861–1870.
- Raga, R. A., Andayani, W., Pertiwi, H. P., Harjo, D., & Terbuka, U. (2023). Ilomata International Journal Of Tax & Accounting. 4(4), 878–894.
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan thin capitalization terhadap tax avoidance. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87.
- Ramadhan, M. R. (2023). The impact of thin capitalization rule on tax avoidance in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 323–335.
- Sahir, S. H. (2022). Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository Uma Pada Tanggal 27 Januari 2022.
- Satrio, I., & Salsabilla, F. M. (2023). Peran harga transfer dan permodalan tipis pada praktik penghindaran pajak di Indonesia. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 6(1), 14–23.
- Simanjuntak, G. Y. (2024). Jurnal Ilmiah Accusi Jurnal Ilmiah Accusi. 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.36985/Zp9jpc63>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanriady, F. (2024). Faktor yang mempengaruhi indikasi penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2).
- Wibowo, A. S., Sari, D., Widyatama, U., & Widyatama, U. (2024). The Effect Of Profitability And Thin Capitalization On Tax Avoidance Moderated By Transfer Pricing In Energy Sector Companies Listed On The Indonesia. 4(12), 1473–1485.
- Wijayanti, D., & Aji, M. R. B. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1).
- World Bank. (2023). *Indonesia country climate and development report*. World Bank.